

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN  
PANGAN  
KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2021. LKIP ini merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama masa satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKIP.

Adapun tujuan penyusunan LKIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Sumedang, 2021

Plt. Kepala Dinas  
Pertanian dan Ketahanan Pangan  
Kabupaten Sumedang



**I. RUDY SUPRAYOGI**  
Pembina TK.I / IV b

NIP. 19640618 199103 1 007

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Gambaran Umum .....	1
1.2 Tugas, Pokok dan Fungsi Organisasi .....	2
1.3. Struktur Organisasi.....	4
1.4. Isu-isu Strategis .....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	<b>14</b>
2.1. Rencana Strategis .....	14
2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.....	15
2.3 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ....	18
2.4 Indikator kinerja Penyelenggara Bidang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.....	23
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	26
2.6 Survey Kepuasan Masyarakat .....	28
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>30</b>
3.1 Capaian Kinerja.....	32
3.2 Realisasi Anggaran.....	43
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>52</b>
4.1 Kesimpulan Capaian Kinerja .....	52
4.2 Langkah-langkah peningkatan Kinerja .....	52

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Gambaran Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2021 sebagai wujud Akuntabilitas Kinerja kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya dengan pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi mandat, Laporan Kinerja ini merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2021 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2021, dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Kepala Daerah. Di samping itu, LKIP ini juga dimaksudkan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang menuju terwujudnya *good governance*, wujud transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Kabupaten Sumedang serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholders* demi perbaikan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.

Secara kronologis penerapan SAKIP dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

- a) mempersiapkan dan menyusun Rencana Strategis yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis untuk mencapai tujuan,
- b) menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten

Sumedang,

- c) menyusun Penetapan Kinerja,
- d) merumuskan Indikator Kinerja Unit Kerja dengan berpedoman kepada kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan pertanian pada upaya-upaya mengatasi permasalahan fundamental, isu-isu aktual dan antisipasi terhadap kendala yang mungkin timbul,
- e) memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi secara seksama,
- f) melakukan pengukuran pencapaian dan evaluasi kinerja dengan mengkaji kinerja aktual dengan rencana/ target yang ditetapkan dan membandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya, serta
- g) melakukan evaluasi secara keseluruhan.

Penerapan SAKIP tahun 2021 merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan dilaksanakan pada tahun pertama pelaksanaan pembangunan pertanian berdasarkan Renstra Periode 2019-2023 yang telah mengalami perubahan di tahun 2021. Diharapkan penerapan SAKIP ini dapat berfungsi secara optimal sehingga dapat dijadikan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan pembaharuan birokrasi pemerintah untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan bersih dari praktek-praktek penyimpangan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya diperlukan suatu komitmen yang kuat dari para pejabat dan semua pegawai jajaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang di dalam mengimplementasikan sistem ini dengan maksud untuk mengetahui seberapa jauh tingkat capaian kinerja, kendala/ hambatan dan permasalahan serta upaya pemecahannya dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang yang pada gilirannya dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban baik keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 disusun sebagai acuan bagi unit kerja di bawahnya dalam menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dokumen Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang ini antara lain memuat visi, misi, analisis perkembangan strategik, tujuan dan sasaran, serta penjabaran program kerja setiap Bidang di lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang setiap tahun dalam periode pembangunan Tahun 2018-2023.

## **1.2 Tugas, Pokok dan Fungsi Organisasi**

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, dengan tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pertanian dan bidang pangan. Sedangkan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, yaitu menyelenggarakan :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura, sumberdaya, ketahanan pangan dan perkebunan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pertanian dan pangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian dan pangan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pertanian dan pangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

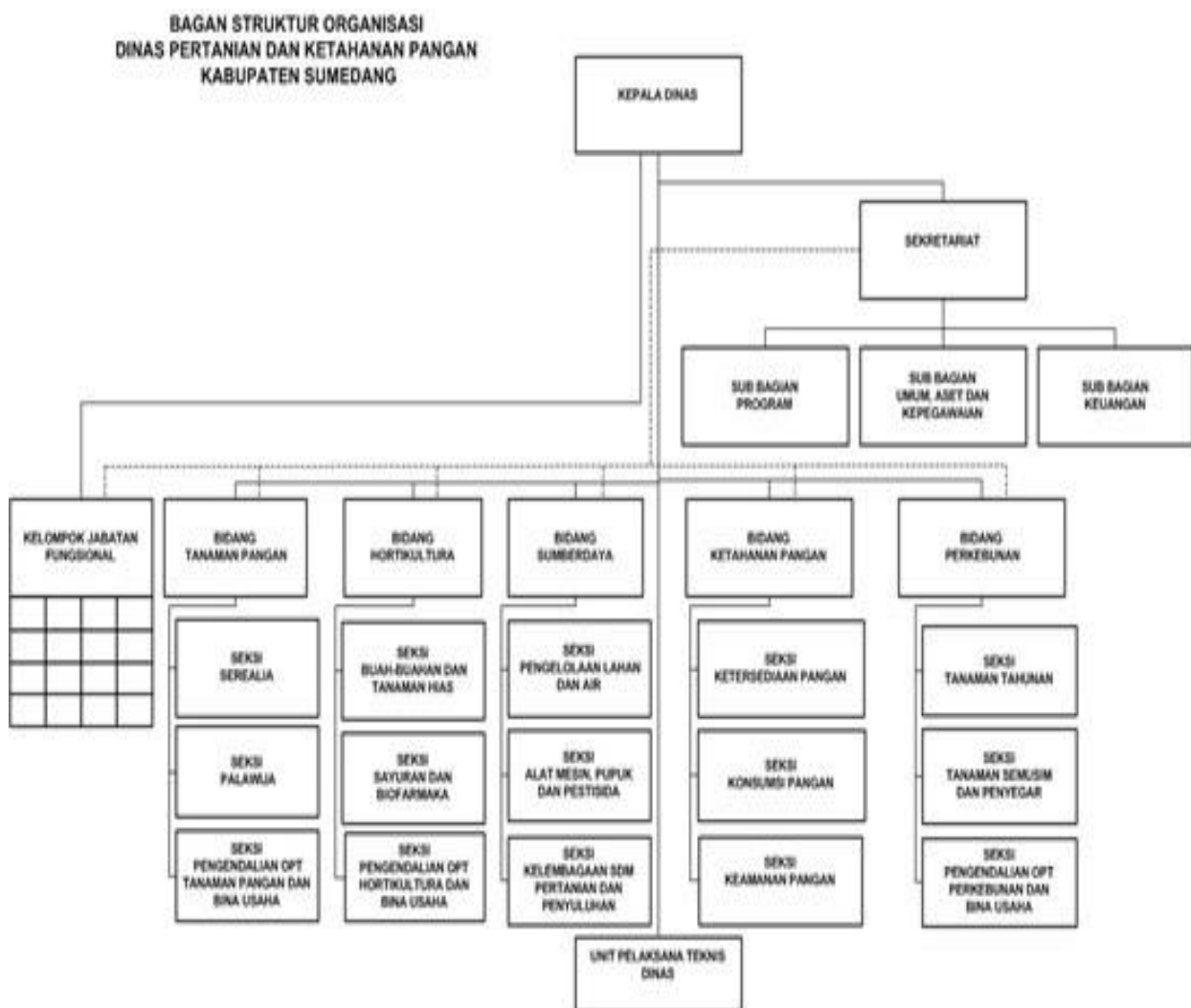
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan Bupati, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi 1 (satu) Sekretariat Dinas, 5 (lima) Bidang, 30 (tiga puluh) UPTD dan Jabatan Fungsional, secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Sekretariat, membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:
  - a. Sub Bagian Umum Asset dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Program
2. Bidang Sumber Daya Pertanian , membawahkan 3 (tiga) Seksi yaitu:
  - a. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air
  - b. Seksi Alat dan Mesin Pertanian, Pupuk dan Pestisida
  - c. Seksi Kelembagaan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Penyuluhan
3. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan 3 (tiga) Seksi yaitu:
  - a. Seksi Serealia
  - b. Seksi Palawija
  - c. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan dan Bina Usaha
4. Bidang Hortikultura, membawahkan 3 (tiga) Seksi yaitu:
  - a. Seksi Buah dan Tanaman Hias
  - b. Seksi Sayuran dan Biofarmaka
  - c. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Hortikultura dan Bina Usaha
5. Bidang Perkebunan, membawahkan 3 (tiga) Seksi yaitu:
  - a. Seksi Tanaman Tahunan
  - b. Seksi Tanaman Semusim dan Penyegar
  - c. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan dan Bina Usaha
6. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan 3 (tiga) Seksi yaitu:
  - a. Seksi Ketersediaan Pangan
  - b. Seksi Konsumsi Pangan
  - c. Seksi Keamanan Pangan
7. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah (26 UPTD tersebar di 26 Kecamatan)

8. UPTD Benih Padi dan Palawija Ujungjaya
9. UPTD Benih Hortikultura dan Perbibitan Perkebunan Rancakalong
10. UPTD Kawasan Agroteknobisnis Sumedang
11. UPTD Agrobisnis Tembakau Sumedang;
12. Jabatan Fungsional.

### 1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, maka pelaksanaan tugas pokok dilakukan oleh unit-unit Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, sesuai dengan Susunan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada gambar berikut ini :



## 1.4. Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam RPJMD serta telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstra terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2013-2017, pelaksanaan peran dan fungsi dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah diupayakan secara optimal, namun sesuai dengan hasil pencapaian kerjanya masih menyisakan permasalahan yang perlu diperbaiki pada periode 2018-2023. Selanjutnya untuk mengetahui isu-isu strategis dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan 6 aspek yakni :

- 1) Permasalahan dalam tanaman pangan
- 2) Permasalahan dalam hortikultura
- 3) Permasalahan dalam perkebunan
- 4) Permasalahan dalam sumber daya pertanian
- 5) Permasalahan dalam ketahanan pangan
- 6) Permasalahan dalam sekretariat dinas.

**Tabel 1.1**  
**Isu Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang**

No	Aspek	Permasalahan	Isu strategis
1.	Bidang tanaman pangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Masih terbatasnya penyebaran dan penyediaan benih unggul bemutu serta sarana produksi lainnya untuk meningkatkan produksi, mutu dan produktifitas tanaman serelia dan palawija.</li><li>2. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur dan alat mesin pertanian untuk mendukung peningkatan indeks pertanaman (IP), perluasan areal tanam baru (PATB) dan peningkatan mutu intensifikasi (PMI) serta percepatan tanam.</li><li>3. Masih tingginya kehilangan hasil akibat penanganan panen, serangan hama penyakit tanaman dan dampak pengaruh iklim.</li><li>4. Belum optimalnya penanganan pasca panen komoditas tanaman pangan.</li><li>5. Masih rendahnya dukungan sarana prasarana dalam rangka penerapan budidaya pertanian yang ramah lingkungan.</li></ol>	Belum optimalnya produksi, produktifitas, mutu hasil produksi dan nilai tambah hasil pertanian sehingga mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian.



No	Aspek	Permasalahan	Isu strategis
2.	Bidang Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih terbatasnya ketersediaan dan penggunaan benih unggul bermutu;</li> <li>2. Belum terjaminnya mutu produksi.</li> <li>3. Belum optimalnya produktivitas komoditas hortikultura;</li> <li>4. Masih tingginya kehilangan hasil akibat serangan hama dan dampak pengaruh iklim serta penanganan pasca panen;</li> <li>5. Belum optimalnya penyebaran informasi produk unggulan daerah.</li> </ol>	
3.	Bidang Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih terbatasnya ketersediaan benih unggul bermutu komoditas perkebunan;</li> <li>2. Belum optimalnya pemanfaatan lahan perkebunan;</li> <li>3. Belum optimalnya produktivitas komoditas perkebunan;</li> <li>4. Masih tingginya gangguan hama penyakit komoditas perkebunan;</li> <li>5. Masih rendahnya pengetahuan sikap dan keterampilan petani dalam penanganan budidaya, penanganan pasca panen dan pengelolaan hasil perkebunan.</li> </ol>	
4.	Bidang Sumberdaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terpenuhinya secara optimal sarana dan prasarana infrastruktur baik kuantitas maupun kualitas;</li> <li>2. Belum ada regulasi tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, banyaknya pengembangan wilayah perumahan;</li> <li>3. Belum terpenuhinya secara optimal alat mesin pertanian baik kuantitas maupun kualitas untuk percepatan tanam, penanggulangan kekurangan tenaga kerja serta pengamanan produksi pertanian;</li> <li>4. Belum optimalnya kapasitas kerja alat pertanian;</li> <li>5. Tingginya resiko usaha tani yang mengakibatkan kegagalan panen;</li> <li>6. Penyaluran pupuk besubsidi masih belum memenuhi kaidah ENAM TEPAT (tepat jenis,</li> </ol>	

No	Aspek	Permasalahan	Isu strategis
		<p>tepat jumlah, tepat harga, tepat mutu, tepat waktu, dan tepat tempat);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Masih rendahnya kualitas SDM petani;</li> <li>8. Masih rendahnya minat dan kesadaran petani untuk berkelompok;</li> <li>9. Masih rendahnya insentif dan disinsentif buruh tani, baik berupa sarana produksi, keterampilan sehingga kesejahteraan buruh tani masih rendah;</li> <li>10. Masih rendahnya dinamika kelembagaan tani;</li> <li>11. Belum dinamisnya kelembagaan penyuluhan petani;</li> <li>12. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kinerja penyuluhan;</li> <li>13. Terbatasnya jumlah SDM penyuluh pertanian dan;</li> <li>14. Masih rendahnya kompetensi SDM penyuluh.</li> </ol>	
5.	Bidang Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya ketersediaan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat;</li> <li>2. Belum meratanya ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah;</li> <li>3. Ketersediaan pangan masih tergantung pada pangan impor/ luar daerah;</li> <li>4. Pangan belum terdistribusikan dengan baik dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;</li> <li>5. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan pokok;</li> <li>6. Lemahnya akses data dan informasi harga pasokan dan akses pangan;</li> <li>7. Tingginya potensi penduduk yang terkena rawan pangan dan;</li> <li>8. Intervensi/ penanganan desa rawan pangan tidak tepat berada di lokasi desa yang termasuk kategori miskin;</li> <li>9. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pangan pokok (beras);</li> <li>10. Masih rendahnya konsumsi panganekaragaman pangan masyarakat;</li> </ol>	Belum tercapainya pemenuhan ketersediaan pangan, masih rendah konsumsi panganekaragaman pangan dan belum terjaminnya keamanan pangan segar asal tumbuhan.

No	Aspek	Permasalahan	Isu strategis
		<p>11. Belum optimalnya kesarana konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, masih ada daerah yang terindikasi rawan pangan yang menimbulkan kurang gizi terutama gizi buruk bagi balita (stunting);</p> <p>12. Belum mencukupinya produksi pangan dalam memenuhi ketersediaan konsumsi per kapita per hari dan diikuti tingginya laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumedang;</p> <p>13. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal karena kurun waktu 2014-2018, focus pemanfaatan lahan untuk komoditas Pajale;</p> <p>14. Belum optimalnya pemanfaatan pekarangan masyarakat sebagai sumber pangan bergizi dan pendapatan keluarga;</p> <p>15. Beredarnya pangan segar asal tumbuhan terpapar bahan racun cemaran seperti pestisida, formalin, dan bakteri fatogen yang berbahaya bagi tubuh manusia;</p> <p>16. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap keamanan produk pangan segar.</p>	
6.	Sekretariat Dinas	<p>1. Masih kurangnya jumlah sarana dan prasarana penunjang pelayanan tugas dan fungsi organisasi;</p> <p>2. Kurangnya jumlah SDM aparatur;</p> <p>3. Masih kurangnya profesionalitas SDM aparatur;</p> <p>4. Belum optimalnya prosedur kerja yang sesuai dengan standar pelayanan yang baik;</p> <p>5. Belum optimalnya sarana teknologi dan informasi dan</p> <p>6. Belum adanya database yang valid untuk perencanaan pembangunan pertanian jangka panjang.</p>	Belum optimalnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah

Dari tabel diatas dapat diketahui secara singkat isu-isu strategis dari aspek Pemasalahan dalam pelayanan bidang pertanian dan bidang ketahanan pangan sebagai berikut :

**1. Isu belum optimalnya produksi, produktivitas, mutu hasil produksi dan nilai tambah hasil pertanian sehingga mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian**

Pembangunan daerah pada hakikatnya ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Untuk itu pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok. Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi harus dilakukan melalui prinsip perkembangan ekonimi yang seimbang dengan menerapkan konsep-konsep *pro poor, pro job, pro growth*, dan *pro environment* dengan memperhatikan *community empowerment*.

Berdasarkan data BPS, nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada sektor pertanian (khusus sub sektor tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan perkebunan) mengalami kenaikan, dari 2.824.204 5 juta rupiah pada tahun 2016 menjadi 3.039.118,6 juta rupiah pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan pada tahun 2017 sektor pertanian di Kabupaten Sumedang mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 7,61%. Jika di dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya berarti lajunya mengalami perlambatan. Laju pertumbuhan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di sektor pertanian, tanpa di pengaruhi inflansi.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir srtruktur ekonomi Kabupaten Sumedang masih di dominasi oleh empat kategori lapangan usaha, yaitu pertanian, kehutanan, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, dan kontruksi. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Sumedang pada tahun 2017 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu mencapai 20,33%. Nilai tersebut didominasi oleh peranan lapangan usaha pertanian dari sub sektor tanaman pangan, tanaman hortikultura dan perkebunan sebesar 16,22% dan sisanya dari sub sektor perternakan, kehutanan dan perikanan. Hal tersebut menggambarkan struktur ekonomi kabupaten Sumedang masih tergantung terhadap kemampuan produksi dan nilai tambah sektor pertanian terutama sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salag satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian real suatu daerah. Laju pertumbuhan ekonimi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapngan usaha kegiatan ekonomi yang ada disuatu wilayah selama kurun waktu setahun. Laju partumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2013-2017) sangat dinamis tetapi cenderung meningkat terutama tahun 2017 pada sektor pertanian 6,99% terutama sub sektor tanaman pangan 10,04% tanaman hortikultura 3,2% dan perkebunan 4,12%.

Kondisi tersebut diatas menggambarkan bahwa sektor pertanian masih sangat potensial dikembangkan sebagai lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap setuktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di kabupaten Sumedang.

Selain itu,berdasarkan hasil penelitian terdapat peluang untuk mengembangkan sektor pertanian karena permintaan hasil pertanian dari pasar local dan regional cukup besar.

Adapun hambatan dalam hal ini produksi, produktivitas dan mutu hasil dan nilai tambah hasil pertanian sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan muncul dari : ketersediaan sumber-sumber air dan sarana infrastruktur tingkat kesuburan lahan terbatasnya kepemilikan lahan alat mesin pertanian prapanen, panen dan pasca panen penyediaan benih unggul pelayanan saprodi tingkat kehilangan hasil yang masih tinggi akibat serangan organisme pengganggu tanaman dan dampak perubahan iklim, penerapan teknologi produksi yang relatif rendah standar, teknis proses penanganan panen dan pasca panen, keterbatasan modal dan keterampilan tenaga kerja petani, jaminan asuransi usaha tani, sistem tataniaga hasil pertanian dan relatif panjang, terbatasnya penyebaran informasi dan fasilitas informasi, dan fasilitas promosi dan usaha tani kapasitas dan sarana pendukung penyuluhan pertanian belum efektif dan produktif dan pendapatan buruh tani masih rendah sebagai salah satu kantong kemiskinan di sektor pertanian.

Sedangkan ancaman adalah berupa masuknya produk pertanian dari luar Sumedang dan luar negeri. Adapun strategi untuk mendukung pengembangan sektor pertanian adalah mendorong agribisnis adalah komoditas unggulan dengan meningkatkan skala produksi secara intensifikasi dan efisiensi alokasi input, pembentukan kelompok-kelompok usaha, meningkatkan pangsa pasar dengan cara pengembangan dan penetrasi pasar, kerja sama dengan lembaga keuangan, investor, dan sumber pembiayaan lainnya guna mengundang modal, menerapkan dan mengembangkan teknologi serta kerjasama dengan lembaga penelitian dalam pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produksi sektor pertanian. Dalam perspektif ke depan, strategi yang perlu digarisbawahi adalah meningkatkan pengguna teknologi pertanian serta meningkatkan pangsa pasar dengan cara pengembangan produk, sehingga perlu upaya mendorong berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian sehingga dapat memberikan *value added* pada komoditas pertanian di Kabupaten Sumedang.

## **2. Isu belum tercapainya pemenuhan ketersediaan pangan, masih rendah konsumsi panganekaragaman pangan dan belum tejaminnya kemandirian pangan segar asal tumbuan sehingga mempengaruhi pemantapan ketahanan pangan daerah.**

Peluang pelayanan dibidang ketahanan pangan adalah Kabupaten Sumedang salah satu pemasok pangan utama di Jawa Barat, konsumen paling tinggi, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, daya saing daerah yang mampu menarik investasi, daya tarik pariwisata agribisnis di Kabupaten Sumedang, dan potensi pengembangan wilayah agribisnis.

Adapun tantangannya adalah masih terfokus pada peningkatan produksi pangan pokok, belum mempertimbangkan kecukupan gizi tingginya konsumsi padi-padian terutama beras dan masih rendahnya konsumsi ubi-ubian, sayur, buah dan pangan hewani masih rendahnya konsumsi penganekaragaman pangan dan pemanfaatan pangaan lokal terdapat beberapa wilayah memiliki tingkat kerentanan ancaman bencana alam yang tinggi dan penetapan standar pangan yang semakin ketat.

Adapun hambatannya adalah adanya keterbatasan dalam penyediaan/pengadaan cadangan pangan pemerintah. Kenaikan konsumsi beras terjadi karena meningkatnya pagu produksi padi di Kabupaten Sumedang dan semua pemanfaatan lahan pada prioritas komoditi pajale, sehingga produksi komoditi kelompok pangan lainnya belum begitu optimal, hal ini di prediksi berpengaruh terhadap konsumsi karbohidrat (beras), sehingga tidak tersedianya lahan untuk penanaman tanaman diluar padi, Karena lahan yang ada dimanfaatkan untuk program pemerintah pajale (padi, jagung, kedelai). Sedangkan lahan pekarangan belum dimanfaatkan dengan optimal. Tidak seluruh kecamatan mengajukan desa yang termasuk kategori miskin tinggi (rawan pangan) untuk mendapatkan intervensi/ penanganan rawan pangan. Alokasi intervensi/ penanganan desa rawan pangan tidak tepat berada dilokasi desa yang termasuk kategori miskin tinggi.

Sedangkan ancamannya adalah situasi ekonomi dan perdagangan bebas di dunia internasional, berpengaruh cukup kuat terhadap ketahanan pangan didalam negeri termasuk Kabupaten Sumedang, terutama harga dan pasokan pangan yang begitu dinamis mempengaruhi ketersediaan pangan.

Adapun strategi untuk mendukung pengembangan sektor ketahanan pangan adalah mewujudkan pemantapan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan, yang tercermin dari menurunnya jumlah penduduk rawan pangan, stabilnya harga dan pasokan pangan pokok, dan meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, pada tahun 2021 jumlah penduduk Sumedang 1.159.454 orang dengan laju pertumbuhan penduduk 0,38% dan hal ini akan mendorong pemerintah Kabupaten Sumedang pangan per kapita terus meningkat didukung bergeseran meningkatnya pendapatan, kesadaran akan kesehatan dan pergeseran pola makan karena pengaruh globalisasi dan ragam aktivitas masyarakat. Pada sisi lain ketersediaan sumber daya lahan semakin berkurang, karena tekanan penduduk serta persaingan pemanfaatan lahan antara sektor pangan dengan sektor non pangan.

Sementara itu jumlah penduduk miskin yang rentan terhadap masalah perawanan pangan masih merupakan kendala. Penyebab utama kerawanan pangan dan kemiskinan adalah keterbatasan keterampilan yang dikuasai, sehingga kesulitan untuk memasuki lapangan kerja, serta keterbatasan aset dan akses terhadap sumber daya untuk mengembangkan usaha. Masalah kemiskinan tidak boleh dibiarkan begitu saja, sehingga harus ada upaya perbaikan dan peningkatan kemampuan masyarakat miskin. Diantaraya melalui pemberdayaan masyarakat,

penciptaan lapangan kerja, dll. Jika upaya tersebut tidak dilakukan, dikhawatirkan masyarakat miskin tersebut akan semakin terpuruk dan semakin menderita. Perkembangan teknologi informasi merupakan penunjang bagi efektivitas manajemen pembangunan dan ketahanan pangan, yang juga menunjang pengembangan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. Disisi ketersediaan pangan, selain masih tersedia sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk produksi pangan, juga tersedia teknologi untuk meningkatkan produksi bahan pangan primer maupun olahan. Adapun peluang pengembangan sistem distribusi pangan ditunjang oleh kemajuan teknologi komunikasi dan alat transportasi yang apabila didayagunakan dapat membuka keterisolasian daerah terpencil.

Untuk konsumsi pangan, potensi peningkatan juga ditunjang oleh kemajuan teknologi informasi, kegiatan promosi dan advokasi, serta dukungan organisasi masyarakat sebagai infrastruktur sosial yang membantu proses peningkatan kesadaran gizi masyarakat. Pemdukung ini juga merupakan agen pelaku usaha dibidang pangan yang menggerakkan perekonomian daerah maupun nasional. Kegiatan ekonomi pangan masyarakat memiliki peran penting dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Penggunaan Rekayasa Teknologi Informatika untuk pengembangan sistem dan jaringan data dan informasi menunjang dalam pemantapan ketahanan pangan. Informasi yang disusun diantaranya mengenai peta-peta produksi, distribusi, konsumsi, dan sistem deteksi dini kerawanan pangan yang terkoneksi antar daerah dan dengan pusat.

Berdasarkan perubahan regulasi secara nasional khususnya Permendagri nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenkatur Perangkat Daerah dan Provinsi Kabupaten/ Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah serta hasil evaluasi pelaksanaan renstra. Sebelumnya, pelayanan ketahanan pangan akan fokus pada isu-isu setrategis sebagai berikut :

1. Terfokus pada peningkatan produksi dengan mempertimbangkan pencukupan gizi
2. Menekan tingginya konsumsi padi-padian terutama beras dan meningkatkan konsumsi umbi-umbian, sayur, buah dan pangan hewani
3. Meningkatkan konsumsi penganekaragaman pangan dan pemanfaatan pangan lokal
4. Ketersediaan pangan dalam mengantisipasi rawan bencana alam
5. Sektor pangan menjadikan usaha untuk penurunan kemiskinan dikantung-kantung daerah miskin yang rawan pangan (angka kemiskinan 9,76%, BPS bulan September 2018)
6. Penanganan daerah rawan pangan terutama daerah yang terindikasi rawan pangan yang menimbulkan kurang gizi terutama gizi buruk bagi balita (stunting). Rawan pangan melibatkan banyak aspek seperti : akses listrik, air, pendidikan (SD), pangan (stunting), akses jalan, roda empat, buta huruf serta kematian ibu melahirkan dan anak lahir.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan LKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pengembangan Kabupaten Sumedang Tahun 2021 disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2021.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan realisasi tahun ini dengan tahun yang lalu
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah dalam dokumen renstra
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisa penyebab peningkatan/ penurunan kinerja beserta solusi yang dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
7. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja.

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

### **BAB IV PENUTUP**

Mengemukakan tinjauan secara umum dengan mengemukakan permasalahan/kendala yang berkaitan dengan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang, dan strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya.



## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan produk dari perencanaan strategis, yaitu suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

#### 2.1.1 Visi dan Misi

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai dengan arahan RJPMD Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 bahwa pemerintah Kabupaten Sumedang akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sesuai dengan RJPMD periode 2018-2023 sebagai berikut :

#### VISI :

*“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023”*



Misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang di sesuaikan dengan misi bupati terpilih. diarahkan ke misi nomor 3

## 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan tujuan pembangunan jangka menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang ditempuh menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kabupaten Sumedang, kebijakan pembangunan jangka menengah provinsi, nasional dan isu-isu strategis pembangunan pertanian. Selanjutnya, tujuan tersebut dikolaborasi dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Terpilih untuk menghasilkan rumusan tujuan pembangunan Kabupaten Sumedang 2018-2023.

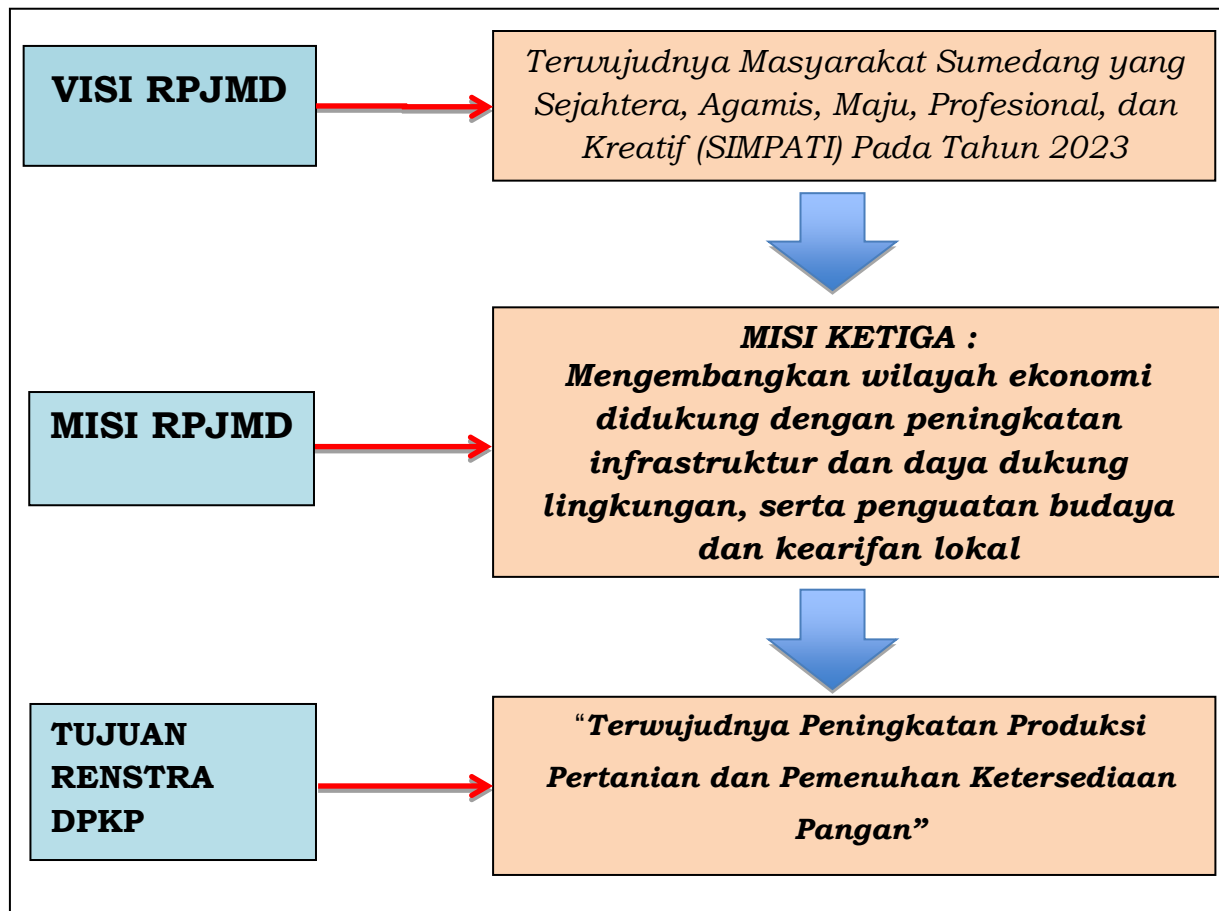
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang terkait dengan Misi Ketiga RPJMD, yaitu Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal. Pada Misi Ketiga terdapat Tujuan yang terkait, yaitu Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata. Tujuan RPJMD tersebut didukung dengan Sasarannya adalah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Perkembangan Agribisnis dan Menjamin Ketahanan Pangan Daerah.

Untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD tersebut maka di dukung oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan tujuan periode 2018-2023 adalah :

***“Terwujudnya Peningkatan Produksi Pertanian dan Pemenuhan Ketersediaan Pangan”***

Peningkatan produksi pertanian dan pemenuhan ketersediaan pangan sebagai salah bentuk untuk mewujudkan percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ketahanan pangan daerah di Kabupaten Sumedang. Ketahanan pangan didukung oleh beberapa sub sektor pertanian antara lain tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Ketersediaan pangan diawali dengan hasil produksi pertanian yang melimpah dan mencukupi baik kualitas maupun kuantitas. Pergerakan perkembangan produksi pertanian akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan berdaya saing.

Adapun keterkaitan tujuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan Visi Misi RPJMD diilustrasikan dalam skema di bawah ini.



Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Sasaran Renstra selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih, sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJMD periode berkenaan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan jangka menengah pertanian dan ketahanan pangan merupakan sarana untuk melaksanakan sekaligus upaya mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang telah menetapkan sasaran yaitu :

1. *Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian;*
2. *Menjamin Ketersediaan Pangan Pokok*

Adapun tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Periode 2018-2023 disajikan pada Tabel 2.1.

**TABEL 2.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN**  
**PANGAN PERIODE 2018-2023**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja Renstra	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
							2019	2020	2021	2022	2023	
1	Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan pemenuhan ketersediaan pangan	1. Jumlah Produksi Komoditas Pertanian			ton	733.822					965.324	965.324
		Meningkatnya produksi komoditas pertanian	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian :	ton	733.822	758.660	768.727	846.959	903.027	965.324	965.324	
			a. Tanaman Pangan:	ton	576.030	599.290	607.763	608.190	647.544	691.957	691.957	
			- Padi	ton	354.748	358.331	361.951	387.374	414.398	443.406	443.406	
			- Jagung	ton	-	-	-	110.060	117.816	126.063	126.063	
			- Tanaman Pangan Lainnya	ton	221.282	240.959	245.812	110.755	115.330	122.488	122.488	
			b. Hortikultura	ton	151.330	152.843	154.372	231.717	247.937	265.292	265.292	
			c. Perkebunan	ton	6.462	6.527	6.592	7.053	7.547	8.075	8.075	
		2. Jumlah ketersediaan pangan pokok			kg/kapita/tahun	185	187	189	202	216	231	231
		Menjamin ketersediaan pangan pokok	Jumlah ketersediaan pangan pokok	kg/kapita/tahun	185	187	189	202	216	231	231	
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	persen		85	87,3	88	88,5	89,4	90,2	90,2			

## 2.3 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

### a. Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya :

1. Meningkatkan produksi, mutu dan nilai tambah produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. Menerapkan budidaya yang baik dan benar sesuai dengan *good agriculture practices* (GAP);
3. Peningkatan penggunaan benih unggul dan bermutu, penetapan standar baku budidaya dan pemanfaatan faktor-faktor produksi dengan teknologi baru;
4. Meningkatkan kemandirian pengendalian hama terpadu;
5. Optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam, prasarana dan sarana pertanian, serta akses pembiayaan dan perlindungan petani;
6. Meningkatkan jumlah kelompok pengolahan dan ketersediaan aneka produk olahan hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
7. Meningkatkan mutu produk hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berstandar SNI (Standar Nasional Indonesia);
8. Optimalisasi sumberdaya manusia penyuluh pertanian dan revitalisasi mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
9. Pemanfaatan sistem sarana informasi terkini dan media konten sebagai media pembinaan komunitas.
10. Peningkatan pendapatan petani dan buruh tani;
11. Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan dan gizi;
12. Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan;
13. Peningkatan ketersediaan pangan dan stabilisasi harga;
14. Daerah rawan pangan (*stunting*) yang diintervensi;
15. Penguatan kelembagaan ketahanan pangan.

## **b. Arah Kebijakan**

Kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang adalah :

1. Peningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. Pengembangan kawasan pertanian komoditas unggulan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
3. Menurunkan tingkat kehilangan hasil pasca panen padi;
4. Pemanfaatan teknologi pertanian yang ramah lingkungan;
5. Meningkatkan penggunaan benih unggul bersertifikat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
6. Perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dari organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim;
7. Kajian dan Penerapan regulasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
8. Akses permodalan dari lembaga keuangan;
9. Meningkatkan ketersediaan pupuk;
10. Peningkatan dan pemanfaatan alat dan mesin pertanian (ALSINTAN) pra panen dan pasca panen;
11. Pembangunan dan Perbaikan sumber-sumber air pertanian, jaringan irigasi tersier/jaringan irigasi desa, jalan usaha tani/jalan produksi pertanian;
12. Pengembangan produk pengolahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
13. Menyelenggarakan temu bisnis pelaku melalui promosi produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
14. Menyediakan sistem informasi harga produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
15. Peningkatan adopsi pelaksanaan SL-PTT, SLGAP, SL-GHP, SL-PHT dan SL-Iklim tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
16. Penguatan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian, peningkatan kapasitas penyuluh pertanian dan penguatan sarana pendukung penyuluhan pertanian.
17. Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai basis data ketersediaan produk hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
18. Meningkatkan pemberdayaan, pengawalan dan pendampingan buruh tani melalui peningkatan fasilitasi sarana produksi pertanian, keterampilan serta kesempatan kerja dalam menunjang kesejahteraan buruh tani.
19. Penganekaragaman konsumsi pangan;
20. Akses masyarakat terhadap pangan berkualitas;
21. Keamanan pangan segar asal tumbuhan;

22. Kelembagaan dewan keamanan pangan;
23. Peningkatan diversifikasi dan keamanan pangan;
24. Peningkatan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan;
25. Koordinasi sektor produksi dengan pasar pengguna;
26. Peningkatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
27. Peningkatan penanggulangan daerah rentan pangan.

Selanjutnya struktur keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan pembangunan pertanian Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**TABEL 2.2**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN SUMEDANG 2018-2023**

<b>VISI RPJMD : Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023</b>			
<b>MISI RPJMD 3: Mengembangkan Wilayah Ekonomi didukung dengan Peningkatan Infrastruktur, Daya Dukung Lingkungan serta Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1. Terwujudnya percepatan pengembangan wilayah ekonomi agribisnis, industri dan pariwisata	1.3 Meningkatkan produksi komoditas unggulan daerah	Peningkatkan pendapatan petani dan buruh tani	Memfasilitasi sarana produksi dan penyuluhan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian serta mendukung terwujudnya kawasan agribisnis.
	1.4 Menjamin Ketahanan Pangan Daerah	Penguatan ketahanan pangan	Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam.

**TABEL 2.3**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERTANIAN DAN**  
**KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUMEDANG 2018-2023**

<b>VISI RPJMD : Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023</b>		
<b>MISI RPJMD 3: Mengembangkan Wilayah Ekonomi didukung dengan Peningkatan Infrastruktur, Daya Dukung Lingkungan serta Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal</b>		
<b>TUJUAN : Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan pemenuhan ketersediaan pangan</b>		
<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatnya produksi komoditas pertanian	Meningkatkan produksi, mutu dan nilai tambah produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;	1. Peningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 2. Pengembangan kawasan pertanian komoditas unggulan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 3. Menurunkan tingkat kehilangan hasil pasca panen padi;
	Menerapkan budidaya yang baik dan benar sesuai dengan <i>good agriculture practices</i> (GAP);	4. Pemanfaatan teknologi pertanian yang ramah lingkungan;
	Peningkatan penggunaan benih unggul dan bermutu, penetapan standar baku budidaya dan pemanfaatan faktor-faktor produksi dengan teknologi baru;	5. Meningkatkan penggunaan benih unggul bersertifikat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
	Meningkatkan kemandirian pengendalian hama terpadu;	6. Perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dari organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim;
	Optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam, prasarana dan sarana pertanian, serta akses pembiayaan dan perlindungan petani;	7. Kajian dan Penerapan regulasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; 8. Akses permodalan dari lembaga keuangan; 9. Meningkatkan ketersediaan pupuk; 10. Peningkatan dan pemanfaatan alat dan mesin pertanian (ALSINTAN) pra panen dan pasca panen; 11. Pembangunan dan Perbaikan sumber-sumber air pertanian, jaringan irigasi tersier/jaringan irigasi desa, jalan usaha tani/jalan produksi pertanian;
	Meningkatkan jumlah kelompok pengolahan dan ketersediaan aneka produk	12. Pengembangan produk pengolahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;



<b>VISI RPJMD : Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023</b>		
<b>MISI RPJMD 3: Mengembangkan Wilayah Ekonomi didukung dengan Peningkatan Infrastruktur, Daya Dukung Lingkungan serta Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal</b>		
<b>TUJUAN : Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan pemenuhan ketersediaan pangan</b>		
<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
	olahan hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;	13. Menyelenggarakan temu bisnis pelaku melalui promosi produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 14. Menyediakan sistem informasi harga produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
	Meningkatkan mutu produk hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berstandar SNI (Standar Nasional Indonesia);	15. Peningkatan adopsi pelaksanaan SL-PTT, SLGAP, SL-GHP, SL-PHT dan SL-Iklim tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
	Optimalisasi sumberdaya manusia penyuluh pertanian dan revitalisasi mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian;	16. Penguatan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian, peningkatan kapasitas penyuluh pertanian dan penguatan sarana pendukung penyuluhan pertanian
	Pemanfaatan sistem sarana informasi terkini dan media konten sebagai media pembinaan komunitas.	17. Peningkatan pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai basis data ketersediaan produk hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
	Peningkatan pendapatan petani dan buruh tani;	18. Meningkatkan pemberdayaan, pengawalan dan pendampingan buruh tani melalui peningkatan fasilitasi sarana produksi pertanian, keterampilan serta kesempatan kerja dalam menunjang kesejahteraan buruh tani.
Menjamin Ketahanan Pangan Daerah	Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan dan gizi;	19. Penganekaragaman konsumsi pangan; 20. Akses masyarakat terhadap pangan berkualitas; 21. Peningkatan diversifikasi dan keamanan pangan;
	Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan;	22. Keamanan pangan segar asal tumbuhan;
	Peningkatan ketersediaan pangan dan stabilisasi harga;	23. Peningkatan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan; 24. Koordinasi sektor produksi dengan pasar pengguna;

<b>VISI RPJMD : Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023</b>		
<b>MISI RPJMD 3: Mengembangkan Wilayah Ekonomi didukung dengan Peningkatan Infrastruktur, Daya Dukung Lingkungan serta Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal</b>		
<b>TUJUAN : Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan pemenuhan ketersediaan pangan</b>		
<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
		25. Peningkatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
	Daerah rawan pangan ( <i>stunting</i> ) yang diintervensi;	26. Peningkatan penanggulangan daerah rentan pangan.
	Penguatan kelembagaan ketahanan pangan.	27. Kelembagaan dewan ketahanan pangan;

## 2.4 Indikator kinerja Penyelenggara Bidang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai pembagian bidang urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

**TABEL 2.4**  
**INDIKATOR BIDANG URUSAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

### A. SEBELUM PERUBAHAN RENSTRA

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun	
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
<b>URUSAN PANGAN</b>					
<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan</b>					
1	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Persen	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun	
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
2	Persentase Ketersediaan Energi dan Protein per kapita	Persen	91,5	92,5	93,5
3	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar dan pangan olahan	Persen	100	100	100
<b>URUSAN PERTANIAN</b>					
<b>Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan</b>					
1	Jumlah produksi Tanaman pangan	Ton	740.732	815.842	899.384
2	Jumlah produksi Tanaman Hortikultura	Ton	151.333	157.386	164.783
3	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	6.462	6.733	7.057
<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan</b>					
1	Jumlah penambahan alat mesin pertanian	Unit	5.752	6.052	6.352
2	Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)	Persen	1,85	1,95	2,05
3	Jumlah penambahan panjang jalan pertanian	Km	62	77	92
<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan</b>					
1	Jumlah Peningkatan Kelompok Tani Pengolah Hasil Pertanian	Kelompok	105	120	138
2	Jumlah dokumen kerjasama kemitraan usaha kelompok tani	Dokumen	48	53	58
<b>Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan</b>					
1	Jumlah teknologi pertanian yang diadopsi petani	teknologi/ penyuluh pertanian	3	6	9
2	Penumbuhan Kelompok Tani Baru	Kelompok	2.835	275	550

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun	
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
3	Jumlah Peningkatan Kemampuan Kelas Kelompok Pelaksana Kegiatan Penyuluhan :	Kelompok	2.242	2.242	2.242
	-Kelas Pemula (skor 0-250)	Kelompok	767	762	757
	-Kelas Lanjut (skor 251-500)	Kelompok	1.405	1.406	1.407
	-Kelas Madya (skor 501-750)	Kelompok	68	71	74
	-Kelas Utama (skor 751-1000)	Kelompok	2	3	4

## B. SESUDAH PERUBAHAN RENSTRA

No.	Urusan Pemerintahan Bidang dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Target Capaian Kinerja Program Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
I.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	PANGAN							
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan Yang Dikelola	Persen	100	100	100	100	100

	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Energi dan Protein per kapita	Persen	92	92,5	94,5	95	95
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan penduduk rawan pangan	Persen	100	100	100	100	100
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Persen	100	100	100	100	100
<b>III</b>	<b>UNSUR URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>							
<b>2</b>	<b>PERTANIAN</b>							
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan ketersediaan sarana pertanian	persen	34,55	35,77	52,92	70,07	70,07
		Cakupan pengembangan sarana pertanian	Persen	65,45	64,23	47,08	29,93	29,93
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas tambahan lahan pertanian yang terairi	hektar	1.696	1.824	1.952	2.088	2.234
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan Pengendalian Bencana Pertanian	persen	95	95,00	95,00	95,00	95,00
		Cakupan Penanggulangan Bencana Pertanian	persen	18	15,00	12,00	10,00	10,00
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase penyelenggaraan Penyuluhan pertanian	persen	45,00	38,77	34,00	27,37	100

## 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini

maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati sebagai pemberi amanah dan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Untuk mengetahui perjanjian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 2.5**  
**Target Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target RPJMD Tahun 2021
1	Meningkatnya produksi komoditas pertanian	1 Jumlah produksi Tanaman Pangan	ton	576.030	608.190
		:			
		a. Padi	ton	354.748	387.374
		b. Jagung	ton	354.748	110.060
		c. Tanaman Pangan Lainnya	ton	221.282	110.755
		2. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	ton	151.330	231.717
2	Menjamin Ketersediaan Pangan Pokok	1. Ketersediaan Pangan Pokok	kg/kapit a/ tahun	185	202
		2. Skor PPH	persen	85	89,6
3	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Kategori	B	A
		Prosentase tingkat penyerapan anggaran	Persen	98	98
		Inovasi	Buah	N/A	1
		Indeks Pembangunan Zona Integritas/Reformasi Birokrasi	Persen	56,5	70,5

## 2.6 Survey Kepuasan Masyarakat

Pada dasarnya pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik sudah ditetapkan di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) disusun dengan tujuan untuk mengetahui kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya, sedangkan bagi masyarakat Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan.

Survey kepuasan masyarakat ini tersebar di wilayah Kabupaten Sumedang dikoordinir di UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan tiap wilayah kecamatan. Selain itu juga dilaksanakan di tingkat Kabupaten yaitu di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang. Pelaksanaan Survey kepuasan masyarakat diadakan satu kali dalam masa satu tahun untuk Tahun 2019 ini. Hasil survey direkap dan di analisa di kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang, Jl. Pangeran Kornel No. 307 Sumedang.

Responden dalam survey kali ini adalah pengguna layanan dari UPT maupun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang terdiri dari masyarakat umum maupun para petani yang tergabung dalam kelompok tani di wilayah Kabupaten Sumedang. Adapun jumlah responden yang di sampel adalah sebanyak 274 orang. Untuk mengukur kualitas pelayanan digunakan tabel nilai sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Nilai Persepsi, Interval SKM, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan**

Nilai Persepsi	Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60- 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644-3,523	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,524 - 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

### Hasil Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan isian responden pada kuesioner survey kepuasan masyarakat, maka dapat diperoleh jumlah nilai persepsi Unsur Pelayanan. Jumlah tersebut merupakan hasil penjumlahan nilai persepsi pada masing-masing unsur pelayanan dari semua responden yang memberikan jawaban melalui kuesioner. Adapun jumlah nilai per unsur pelayanan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang. Sehingga mencerminkan bahwa waktu pelayanan memerlukan perhatian dalam melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Dari hasil perhitungan didapat Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mencapai 82,03, apabila dikonversi ke tabel konversi survey maka akan mendapatkan mutu pelayanan B dengan kinerja Baik.



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Sedangkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih serta persentase realisasi anggaran lebih rendah dari capaian kinerja. Penghitungannya dengan cara pengurangan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran.

Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2**  
**Target Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target RPJMD Tahun 2021
1	Meningkatnya produksi komoditas pertanian	1. Jumlah produksi komoditas Tanaman Pangan :	ton	608.190
		a. Padi	ton	387.374
		b. Jagung	ton	110.060
		c. Tanaman Pangan Lainnya	ton	110.755
		2. Jumlah Produksi komoditas Hortikultura	ton	231.717
		3. Jumlah Produksi komoditas Perkebunan	ton	7.053
2	Menjamin Ketahanan Pangan Daerah	Ketersediaan Pangan Pokok	kg/kapita/tahun	202
3	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Kategori	BB
		Prosentase tingkat penyerapan anggaran	Persen	98
		Inovasi	Buah	3
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	26,50
		Indeks Zona Integritas Perangkat Daerah	Poin	39

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja, 2021.

### 3.1 Capaian Kinerja

#### 3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Rata-rata realisasi kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang tahun 2021 sebesar 144,49 %. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja **Sangat Tinggi**. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
1	Meningkatnya produksi komoditas pertanian	1. Jumlah produksi komoditas Tanaman Pangan :	ton	608.190	764.539	125,71%	Sangat Tinggi
		a. Padi	ton	387.374	478.554	123,54%	Sangat Tinggi
		b. Jagung	ton	110.060	82.044	74,54%	Rendah
		c. Tanaman Pangan Lainnya	ton	110.755	203.941	184,14%	Sangat Tinggi
		2. Jumlah Produksi komoditas Hortikultura	ton	231.717	213.698	92,22%	Tinggi
		3. Jumlah Produksi komoditas Perkebunan	ton	7.053	8.194,03	116,18 %	Sangat Tinggi
2	Menjamin Ketahanan Pangan Daerah	Ketersediaan Pangan Pokok	kg/kapita/ tahun	202	295,3	146,19%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Kategori	BB	BB	-	
		Prosentase tingkat penyerapan anggaran	Persen	98	90,40	92,24%	Tinggi
		Inovasi	Buah	3	12	400%	Sangat Tinggi
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	26,50	31,94	120,53%	Sangat Tinggi
		Indeks Zona Integritas Perangkat Daerah	Poin	39	31,6	81,10%	Tinggi

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

### **1) Indikator Kinerja “Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Tanaman Pangan: Padi; Jagung dan Tanaman Pangan Lainnya”**

Padi dan jagung merupakan komoditas strategis nasional dan sebagai sumber bahan pangan pokok sebagian besar masyarakat di Kabupaten Sumedang. Tanaman Pangan lainnya seperti : kedelai, kacang tanah dan talas merupakan komoditas tanaman pangan unggulan yang dikembangkan di Kabupaten Sumedang.

Target kinerja “Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Tanaman Pangan tahun 2021 sebesar 608.190 ton dan realisasinya 764.539 ton atau capaian kinerja sebesar 125,71% terdiri dari Padi dengan target jumlah produksi sebesar 387.374 ton dan realisasinya 478.554 ton atau capaian kinerja sebesar 123,54%; Jagung dengan target jumlah produksi sebesar 110.060 ton dan realisasinya 82.044 ton atau capaian kinerja sebesar 74,54%; Tanaman Pangan Lainnya dengan target jumlah produksi sebesar 110.755 ton dan realisasinya 203.941 ton atau capaian kinerja sebesar 184,14%; (*sumber data: Laporan Statistik Pertanian dan Ketahanan Pangan Desember 2021*).

Realisasi kinerja secara menyeluruh sudah mencapai target di akhir tahun namun jumlah produksi tanaman jagung memiliki persentase paling rendah dari target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dengan adanya pandemi Covid-19 beberapa aktifitas terganggu karena dihentikan, jalur distribusi yang terbatas serta banyak sektor yang terhambat sehingga daya beli masyarakat yang menurun dan Dampak Covid-19 mempengaruhi sistem perencanaan dan penganggaran internal Dinas Pertanian dan Ketahanan dimana terdapat refocusing anggaran untuk kegiatan yang mendukung peningkatan produksi maupun di bidang ketahanan pangan. solusi/rekomendasinya adalah pembinaan maksimal terhadap kelompok tani di lapangan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sektor Pertanian merupakan sektor yang tidak berhenti pada masa pandemi covid-19.

### **2) Indikator Kinerja “Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Hortikultura”**

Target kinerja “Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Hortikultura” tahun 2021 sebesar 231.717 ton dan realisasinya 213.698 ton atau capaian kinerja sebesar 92,22% (*sumber data: Laporan Statistik Pertanian dan Ketahanan Pangan Desember 2021*). Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dengan adanya pandemi Covid-19 beberapa aktifitas terganggu karena dihentikan, jalur distribusi yang terbatas serta banyak sektor yang terhambat sehingga daya beli masyarakat yang menurun dan Dampak Covid-19 mempengaruhi system perencanaan dan penganggaran internal Dinas Pertanian dan Ketahanan dimana terdapat refocusing anggaran untuk kegiatan yang mendukung peningkatan produksi maupun di bidang ketahanan pangan. solusi/rekomendasinya adalah pembinaan maksimal terhadap kelompok tani di lapangan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sektor Pertanian merupakan sektor yang tidak berhenti pada masa pandemi covid-19.

### 3) Indikator Kinerja “Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Perkebunan”

Target kinerja “Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Perkebunan” tahun 2021 sebesar 7.053 ton dan realisasinya 8.194,03 ton atau capaian kinerja sebesar 116,18 % (*sumber data: Laporan Statistik Pertanian dan Ketahanan Pangan Desember 2021*). Target kinerja melebihi target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dengan adanya pandemi Covid-19 beberapa aktifitas terganggu karena dihentikan, jalur distribusi yang terbatas serta banyak sektor yang terhambat sehingga daya beli masyarakat yang menurun dan Dampak Covid-19 mempengaruhi system perencanaan dan penganggaran internal Dinas Pertanian dan Ketahanan dimana terdapat refocusing anggaran untuk kegiatan yang mendukung peningkatan produksi maupun di bidang ketahanan pangan. solusi/rekomendasinya adalah pembinaan maksimal terhadap kelompok tani di lapangan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sektor Pertanian merupakan sektor yang tidak berhenti pada masa pandemi covid-19.

### 4) Indikator Kinerja “Jumlah Ketersediaan pangan pokok”

Target kinerja “Jumlah Ketersediaan pangan pokok ” tahun 2021 sebesar 202 kg per kapita per tahun dan realisasinya 295,3 kg perkapita per tahun .atau capaian kinerja sebesar 146,19% (*sumber data: Laporan Statistik Pertanian dan Ketahanan Pangan Desember 2021 dan Sumedang Dalam Angka (Tahun 2021 (BPS))*). Target kinerja melebihi target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dengan adanya pandemi Covid-19 beberapa aktifitas terganggu karena dihentikan, jalur distribusi yang terbatas serta banyak sektor yang terhambat sehingga daya beli masyarakat yang menurun dan Dampak Covid-19 mempengaruhi system perencanaan dan penganggaran internal Dinas Pertanian dan Ketahanan dimana terdapat refocusing anggaran untuk kegiatan yang mendukung peningkatan produksi maupun di bidang ketahanan pangan. solusi/rekomendasinya adalah pembinaan maksimal terhadap Kelompok Lumbung Pangandi lapangan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sektor Pertanian merupakan sektor yang tidak berhenti pada masa pandemi covid-19.

### 5) Indikator Kinerja “Nilai SAKIP”

Target kinerja “Nilai SAKIP” tahun 2021 Kategori BB dan realisasinya kategori BB. Target kinerja melebihi target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dengan adanya pandemi Covid-19 beberapa aktifitas terganggu karena dihentikan, jalur pelayanan yang terbatas serta perubahan terhadap mekanisme pelayanan publik sehingga perlunya peningkatan daya adaptasi serta Dampak Covid-19 mempengaruhi system perencanaan dan penganggaran internal Dinas Pertanian dan Ketahanan dimana terdapat refocusing anggaran untuk kegiatan yang mendukung peningkatan produksi maupun di bidang ketahanan pangan.

solusi/rekomendasinya adalah peningkatan daya adaptasi serta pengawasan dan pembinaan. Sektor Pertanian merupakan sektor yang tidak berhenti pada masa pandemi covid-19.

#### **6) Indikator Kinerja “Presentase tingkat penyerapan anggaran”**

Target kinerja “Presentase tingkat penyerapan anggaran” tahun 2021 dengan persentase 98% dan realisasi 90,40% atau capaian kinerja sebesar 92,24%. Target kinerja melebihi target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dengan adanya pandemi Covid-19 beberapa aktifitas terganggu karena dihentikan. Dampak Covid-19 mempengaruhi sistem perencanaan dan penganggaran internal Dinas Pertanian dan Ketahanan dimana terdapat refocusing anggaran untuk kegiatan yang mendukung peningkatan produksi maupun di bidang ketahanan pangan. solusi/rekomendasinya adalah melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sebagai dasar perencanaan kegiatan-kegiatan kedepannya. Sektor Pertanian merupakan sektor yang tidak berhenti pada masa pandemi covid-19.

#### **7) Indikator Kinerja “Inovasi”**

Target kinerja “Inovasi” tahun 2021 sebanyak 3 inovasi dan realisasi sebanyak 12 inovasi atau capaian target kinerja 400%. Target kinerja melebihi target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dengan adanya pandemi Covid-19 beberapa aktifitas terganggu karena dihentikan, jalur distribusi yang terbatas serta banyak sektor yang terhambat. Dampak Covid-19 mempengaruhi sistem perencanaan dan penganggaran internal Dinas Pertanian dan Ketahanan dimana terdapat refocusing anggaran untuk kegiatan yang mendukung peningkatan produksi maupun di bidang ketahanan pangan. solusi/rekomendasinya adalah melakukan penelitian berkelanjutan yang dipublikasikan serta menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi. Sektor Pertanian merupakan sektor yang tidak berhenti pada masa pandemi covid-19.

#### **8) Indikator Kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah”**

Target kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah” tahun 2021 dengan nilai 26,50 dan realisasi 31,94 atau capaian kinerja 120,53%. Target kinerja melebihi target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dengan adanya pandemi Covid-19 beberapa aktifitas terganggu karena dihentikan, jalur distribusi yang terbatas serta banyak sektor yang terhambat sehingga daya beli masyarakat yang menurun dan Dampak Covid-19 mempengaruhi system perencanaan dan penganggaran internal Dinas Pertanian dan Ketahanan dimana terdapat refocusing anggaran untuk kegiatan yang mendukung peningkatan produksi maupun di bidang ketahanan pangan. solusi/rekomendasinya adalah peningkatan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sektor Pertanian merupakan sektor yang tidak berhenti pada masa pandemi covid-19.

## 9) Indikator Kinerja “Indeks Zona Integritas Perangkat Daerah”

Target kinerja “Indeks Zona Integritas Perangkat Daerah” tahun 2021 dengan nilai 39 dan realisasi 31,6 atau capaian kinerja 81,10%. Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dengan adanya pandemi Covid-19 beberapa aktifitas terganggu karena dihentikan, jalur distribusi yang terbatas serta banyak sektor yang terhambat sehingga daya beli masyarakat yang menurun dan Dampak Covid-19 mempengaruhi system perencanaan dan penganggaran internal Dinas Pertanian dan Ketahanan dimana terdapat refocusing anggaran untuk kegiatan yang mendukung peningkatan produksi maupun di bidang ketahanan pangan. solusi/rekomendasinya adalah peningkatan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sektor Pertanian merupakan sektor yang tidak berhenti pada masa pandemi covid-19.

### 3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 141,49%. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2020) sebesar 123,58%. Terjadi peningkatan kinerja sebesar 17,91%. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	Ketersediaan Pangan Utama	Persen	100 %	100 %	100	
	Ketersediaan energi dan protein per kapita	Persen	93,35%	93,35%	100	
	Pembinaan dan Pengawasan keamanan pangan segar dan pangan olahan	Persen	100 %	100 %	100	
Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Tanaman Pangan: Padi	Ton	361951	448.320	123,86	
	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Tanaman Pangan: Lainnya	Ton	245812	221.070	89,93	
	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Hortikultura	Ton	154372	235.738	152,7	
	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian Perkebunan	Ton	6592	18.955,63	287,55	
Menjamin ketahanan pangan daerah	Jumlah Ketersediaan pangan pokok (beras)	kg/kapita/tahun	189	223	122,22	
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen	88,5	89,10	100,68	
peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Jumlah penambahan alat mesin pertanian	Unit	6.352	6.064	95,47	
	Luas lahan pertanian yang terairi	Hektar	2.350	5.029,98	214,04	
	Jumlah penambahan panjang jalan pertanian	Km	92	77,801	84,57	
pengolahan dan pemasaran hasil pertanian/perkebunan	Peningkatan Kelompok Tani Pengolah Hasil Pertanian	Kelompok	138	134	97,10	
	Jumlah dokumen kerjasama kemitraan usaha kelompok tani	Dokumen	58	52	89,66	
pemberdayaan penyuluhan	Jumlah teknologi pertanian yang diadopsi petani	Teknologi	9	12	133,33	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
pertanian/perkebunan lapangan	Penumbuhan Kelompok Tani Baru	Kelompok	550	474	86,18	
Rata-rata			-	-	123,58	

Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Satuan	Tahun 2021			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya produksi komoditas pertanian	Jumlah produksi komoditas Pangan	ton	608.190	764.539	125,71	
	Jumlah produksi komoditas Padi	ton	387.374	478.554	123,54	
	Jumlah produksi komoditas Jagung	ton	110.060	82.044	74,54	
	Jumlah produksi komoditas lainnya	ton	110.755	203.941	184,14	
	Jumlah Produksi komoditas Hortikultura	ton	231.717	213.698	92,22	
	Jumlah Produksi komoditas Perkebunan	ton	7.053	8.194,03	116,18	
Menjamin Ketahanan Pangan Daerah	Ketersediaan Pangan Pokok	kg/kapita/tahun	202	295,3	146,19	
Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Kategori	BB	BB	-	
	Prosentase tingkat penyerapan anggaran	Persen	98	90,40	92,24	
	Inovasi	Buah	3	12	400	
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	26,50	31,94	120,53	
	Indeks Zona Integritas Perangkat Daerah	Poin	39	31,6	81,10	
Rata-rata			-	-	141,49	

### 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis**

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2021	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2021
Jumlah produksi komoditas Pangan	691.957	764.539	110,49
Jumlah produksi komoditas Padi	443.406	478.554	107,93
Jumlah produksi komoditas Jagung	126.063	82.044	65,08
Jumlah produksi komoditas lainnya	122.488	203.941	166,50
Jumlah Produksi komoditas Hortikultura	265.292	213.698	80,55
Jumlah Produksi komoditas Perkebunan	8.075	8.194,03	101,47
Ketersediaan Pangan Pokok	231	295,3	127,84
Nilai SAKIP	A	BB	-



Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2021	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2021
Prosentase tingkat penyerapan anggaran	98	90,40	92,24
Inovasi	5	12	400
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	32,50	31,94	98,28
Indeks Zona Integritas Perangkat Daerah	45	31,6	70,22

### 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional

(Tidak Ada)

### 3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah sebagai berikut :

#### 1) Meningkatnya produksi komoditas pertanian

Indikator kinerja Meningkatnya produksi komoditas pertanian tahun 2021 yaitu Jumlah produksi komoditas Tanaman Pangan sebesar 691.957 ton dan realisasinya 764.539 ton atau capaian kinerja sebesar 110,49% terdiri dari Padi dengan target jumlah produksi sebesar 443.406 ton dan realisasinya 478.554 ton atau capaian kinerja sebesar 107,93%; Jagung dengan target jumlah produksi sebesar 126.063 ton dan realisasinya 82.044 ton atau capaian kinerja sebesar 65,08%; Tanaman Pangan Lainnya dengan target jumlah produksi sebesar 122.488 ton dan realisasinya 203.941 ton atau capaian kinerja sebesar 166,5%; Realisasi kinerja jumlah produksi tanaman padi dan tanaman pangan lainnya melebihi target sedangkan jumlah produksi tanaman pangan jagung tidak mencapai target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 sehingga banyak aktivitas yang terganggu dan di lapangan masyarakat/petani lebih memilih menanam tanaman padi dari pada tanaman pangan yang lain dengan alasan untuk pemenuhan bahan pokok utama karena dikhawatirkan ketahanan pangan menurun. Solusi/rekomendasinya adalah pembinaan maksimal terhadap Kelompok tani komoditas tanaman pangan di lapangan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sektor Pertanian merupakan sektor yang tidak berhenti pada masa pandemi covid-19.

Indikator kinerja Meningkatnya produksi komoditas pertanian tahun 2021 yaitu Jumlah produksi komoditas Tanaman Hortikultura dengan target jumlah produksi sebesar 265.292 ton dan realisasinya 213.698 ton atau capaian kinerja sebesar 80,55%; Target kinerja tidak mencapai target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target dengan adanya pandemi Covid-19 beberapa aktifitas terganggu karena dihentikan, jalur distribusi yang terbatas serta banyak sektor yang terhambat sehingga daya beli masyarakat yang menurun dan Dampak Covid-19 mempengaruhi sistem perencanaan dan

penganggaran internal Dinas Pertanian dan Ketahanan dimana terdapat refokusing anggaran untuk kegiatan yang mendukung peningkatan produksi maupun di bidang ketahanan pangan. solusi/rekomendasinya adalah pembinaan maksimal terhadap Kelompok tani komoditas hortikultura di lapangan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sektor Pertanian merupakan sektor yang tidak berhenti pada masa pandemi covid-19.

Indikator kinerja Meningkatnya produksi komoditas pertanian tahun 2021 yaitu Jumlah produksi komoditas Tanaman Perkebunan dengan target jumlah produksi sebesar 8.075 ton dan realisasinya 8.194,03 ton atau capaian kinerja sebesar 101,47%; Target kinerja melebihi target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target :dengan adanya pandemi Covid-19 beberapa aktifitas terganggu karena dihentikan, jalur distribusi yang terbatas serta banyak sektor yang terhambat sehingga daya beli masyarakat yang menurun dan Dampak Covid-19 mempengaruhi system perencanaan dan penganggaran internal Dinas Pertanian dan Ketahanan dimana terdapat refokusing anggaran untuk kegiatan yang mendukung peningkatan produksi maupun di bidang ketahanan pangan. Solusi/rekomendasinya adalah pembinaan maksimal terhadap tani komoditas perkebunan di lapangan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sektor Pertanian merupakan sektor yang tidak berhenti pada masa pandemi covid-19.

## 2) Menjamin Ketahanan Pangan Daerah

Indikator kinerja Menjamin Ketahanan Pangan Daerah tahun 2021 yaitu Ketersediaan Pangan Pokok dengan target kinerja sebesar 202 kg per kapita per tahun dan realisasinya 295,3 kg perkapita per tahun .atau capaian kinerja sebesar 146,19% (sumber data: Laporan Statistik Pertanian dan Ketahanan Pangan Desember 2021 dan Sumedang Dalam Angka (Tahun 2021 (BPS))). Target kinerja melebihi target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dengan adanya pandemi Covid-19 beberapa aktifitas terganggu karena dihentikan, jalur distribusi yang terbatas serta banyak sektor yang terhambat sehingga daya beli masyarakat yang menurun dan Dampak Covid-19 mempengaruhi system perencanaan dan penganggaran internal Dinas Pertanian dan Ketahanan dimana terdapat refokusing anggaran untuk kegiatan yang mendukung peningkatan produksi maupun di bidang ketahanan pangan. solusi/rekomendasinya adalah pembinaan maksimal terhadap Kelompok Lumbung Pangandi lapangan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sektor Pertanian merupakan sektor yang tidak berhenti pada masa pandemi covid-19.

## 3) Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah

indikator kinerja Program Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah tahun 2021 yaitu Nilai SAKIP dengan target Kategori BB dan realisasinya Kategori BB. Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dengan adanya pandemi Covid-19 beberapa aktifitas terganggu karena dihentikan, jalur pelayanan yang terbatas serta perubahan terhadap mekanisme pelayanan publik sehingga perlunya peningkatan daya adaptasi serta Dampak Covid-19 mempengaruhi system perencanaan dan penganggaran internal Dinas Pertanian dan Ketahanan dimana terdapat refokusing anggaran untuk kegiatan yang mendukung peningkatan produksi maupun di bidang ketahanan pangan.

solusi/rekomendasinya adalah peningkatan daya adaptasi serta pengawasan dan pembinaan. Sektor Pertanian merupakan sektor yang tidak berhenti pada masa pandemi covid-19.

Indikator kinerja Program Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah tahun 2021 yaitu Prosentase tingkat penyerapan anggaran dengan persentase 98% dan realisasinya 90,40% atau capaian kinerja sebesar 92,24%. Target kinerja belum tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dengan adanya pandemi Covid-19 beberapa aktifitas terganggu karena dihentikan. Dampak Covid-19 mempengaruhi sistem perencanaan dan penganggaran internal Dinas Pertanian dan Ketahanan dimana terdapat refocusing anggaran untuk kegiatan yang mendukung peningkatan produksi maupun di bidang ketahanan pangan. solusi/rekomendasinya adalah melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sebagai dasar perencanaan kegiatan-kegiatan kedepannya. Sektor Pertanian merupakan sektor yang tidak berhenti pada masa pandemi covid-19.

Indikator kinerja Program Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah tahun 2021 yaitu Inovasi sebanyak 3 inovasi dan realisasi sebanyak 12 inovasi atau capaian target kinerja 400%. Target kinerja melebihi target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dengan adanya pandemi Covid-19 beberapa aktifitas terganggu karena dihentikan, jalur distribusi yang terbatas serta banyak sektor yang terhambat. Dampak Covid-19 mempengaruhi sistem perencanaan dan penganggaran internal Dinas Pertanian dan Ketahanan dimana terdapat refocusing anggaran untuk kegiatan yang mendukung peningkatan produksi maupun di bidang ketahanan pangan. solusi/rekomendasinya adalah melakukan penelitian berkelanjutan yang dipublikasikan serta menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi. Sektor Pertanian merupakan sektor yang tidak berhenti pada masa pandemi covid-19.

Indikator kinerja Program Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah tahun 2021 yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Perangkat Daerah dengan nilai berturut turut 32,50 dan 45 realisasi 31,94 dan 31,6 capaian kinerja 98,28% dan 70,22%. Target kinerja melebihi target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dengan adanya pandemi Covid-19 beberapa aktifitas terganggu karena dihentikan, jalur distribusi yang terbatas serta banyak sektor yang terhambat sehingga daya beli masyarakat yang menurun dan Dampak Covid-19 mempengaruhi system perencanaan dan penganggaran internal Dinas Pertanian dan Ketahanan dimana terdapat refocusing anggaran untuk kegiatan yang mendukung peningkatan produksi maupun di bidang ketahanan pangan. solusi/rekomendasinya adalah peningkatan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sektor Pertanian merupakan sektor yang tidak berhenti pada masa pandemi covid-19.

### 3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran program Pendukung Pencapaian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2021 Sebesar Rp. 49.819.401.285,00,- yang terdiri dari 15 program. Sedangkan realisainya sebesar Rp. 45.037.633.376,00,- atau 90,40%. Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangkan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Input			Output / Kinerja			Efisiensi (%) (9) = (8) – (5)	Ket.
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Menjamin ketahanan pangan daerah	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	650.500.000	642.660.800	98,79	100,00	100,00	100	1,21	Efisien
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	754.487.300	737.953.400	97,81	100,00	100,00	100	2,19	Efisien
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	50.000.000	49.360.000	98,72	100,00	100,00	100	1,28	Efisien
Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.681.979.000	1.591.840.625	94,64	100,00	95,19	95,19	0,55	Efisien
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	14.819.870.750	14.474.302.879	97,67	100,00	99,90	99,9	2,23	Efisien
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	69.950.550	60.764.250	86,87	100,00	90,00	90	3,13	Efisien
	Program Penyuluhan Pertanian	851.500.000	771.682.900	90,63	100,00	92,48	92,48	1,85	Efisien
		18.878.287.600	18.328.564.854	97,09	100	99,12	99,12	2,03	Efisien
		<b>Rata-rata</b>						<b>2,03</b>	<b>Efisien</b>

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang sepanjang Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian sangat memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata realisasi keuangan 97,09% dan rata-rata realisasi fisik 99,12%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, bahkan terdapat indikator yang menunjukkan

efisiensi cukup sangat tinggi, hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya kolaborasi antar bidang di interna DPKP serta kolaborasi antar OPD. Adanya efisiensi anggaran diperoleh dari :

- a. Sisa tender;
- b. Dukungan capaian fisik dari APBN Dekonsentrasi dan TP;
- c. Dukungan Belanja Langsung APBD Provinsi.
- d. Pencapaian Produksi dari Swadaya Masyarakat

### **3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

DPKP dalam rangka tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2021 melaksanakan 40 kegiatan yang tercakup dalam 7 program yaitu :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan.
2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan indikator Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).
4. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian.
5. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
6. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
7. Program Penyuluhan Pertanian.

Seluruh program kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 2 (dua) indikator sebagaimana tercantum dalam Renstra DPKP Kabupaten Sumedang Periode Tahun 2018-2023 dengan target yang sudah ditetapkan. Adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja DPKP Kabupaten Sumedang sebesar Rp. 49.819.401.285,00.

Berdasarkan data tahun anggaran 2021 pada program kegiatan utama DPKP yang ditujukan untuk secara langsung mencapai target kinerja indikator tersebut terdapat efisiensi anggaran dimana dari alokasi sebesar Rp. 49.819.401.285,00 yang diserap sebesar Rp. 45.037.633.376,00. atau terdapat efisiensi sebesar 9,6% yaitu sebesar Rp. 4.781.767.909,00.

Selain telah melakukan efisiensi dari sisi anggaran, DPKP Kabupaten Sumedang secara umum telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra) dan dokumen perencanaan tahunan (Renja). Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2021 Indikator Kinerja Utama (IKU) DPKP Kabupaten Sumedang dapat melampaui target.

Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu :

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan.
2. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA DPKP Tahun Anggaran 2021.
4. Terbentuknya satu Unit Usaha Penggilingan Beras dan Penguatan Modal Usaha Lumbung Pangan Masyarakat di Gapoktan penerima manfaat dan Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat di 7 Kelompok Tani penerima manfaat.

5. Ketersediaan Energi : 2.226,66 kkal/kapita/hari (103,6%) dari angka standar tingkat konsumsi energi (AKE) sebesar 2.150 kkal/kapita/hari dan Ketersediaan Protein : 66,8 gram/kapita/hari (117,2%) dari angka standar tingkat konsumsi protein (AKP) sebesar 57 kkal/kapita/hari.
6. Tersedianya Rapid Test Kit sebagai bahan pengujian keamanan PSAT, Terlaksananya pengujian keamanan pangan segar asal tumbuhan sebanyak 3 kali dalam satu tahun, dan Dikeluarkannya Nomor Registrasi PSAT PD-UK sebanyak 15 Nomor untuk pelaku usaha PSAT di Kabupaten Sumedang.
7. Adanya bantuan pemerintah dan Pembinaan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (UPTD, PPL, dan POPT).
8. Banyaknya usulan dari kelompok tani terkait kebutuhan alokasi bantuan irigasi untuk pertanian, Tereliasi bantuan dari APBD Provinsi, APBD, dan APBN, Dukungan dari Dinas Pertanian dan ketahan pangan, dan Pembinaan dari UPTD dan PPL dilapangan.
9. Adanya bantuan pemerintah dan Pembinaan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (UPTD, PPL, dan POPT).
10. Pendampingan secara intensif oleh PPL kepada Kelembagaan Petani, Bantuan dari pemerintah berupa JIT, JUT dan prasarana sarana penunjang lainnya, dan Kegiatan SL dari program IPDMIP dan pembuatan SL mandiri dan mitra.

Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah terjadinya beberapa regulasi yang berubah secara mendasar karena kebijakan dari Pemerintah Pusat sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap upaya pencapaian kinerja, karena DPKP Kabupaten Sumedang sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah juga harus mengikuti apa yang diamanatkan oleh perubahan regulasi dimaksud.

Berikut tabel Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk Tahun Anggaran 2021 DPKP Kabupaten Sumedang:

### 3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 90,40 %, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan**  
**Tahun 2021**

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
<b>BELANJA</b>	<b>49.819.401.285</b>	<b>45.037.633.376</b>	<b>90,40</b>	<b>4.781.767.909,00</b>
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	1.454.987.300	1.429.974.200	98,28	25.013.100,00
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	650.500.000	642.660.800	98,79	7.839.200,00

<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase Realisasi (%)</b>	<b>Sisa Anggaran (Rp)</b>
Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	650.500.000	642.660.800	98,79	7.839.200,00
<i>Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan</i>	<i>630.500.000</i>	<i>623.381.000</i>	<i>98,87</i>	<i>7.119.000,00</i>
<i>Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya</i>	<i>20.000.000</i>	<i>19.279.800</i>	<i>96,40</i>	<i>720.200,00</i>
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	754.487.300	737.953.400	97,81	16.533.900,00
Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan	60.000.000	58.863.100	98,11	1.136.900,00
<i>Pemantauan Stok, Pasokan Dan Harga Pangan</i>	<i>60.000.000</i>	<i>58.863.100</i>	<i>98,11</i>	<i>1.136.900,00</i>
Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	46.953.300	44.016.300	93,74	2.937.000,00
<i>Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</i>	<i>46.953.300</i>	<i>44.016.300</i>	<i>93,74</i>	<i>2.937.000,00</i>
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	647.534.000	635.074.000	98,08	12.460.000,00
<i>Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	<i>647.534.000</i>	<i>635.074.000</i>	<i>98,08</i>	<i>12.460.000,00</i>
Program Pengawasan Keamanan Pangan	50.000.000	49.360.000	98,72	640.000,00
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	49.360.000	98,72	640.000,00
<i>Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>50.000.000</i>	<i>49.360.000</i>	<i>98,72</i>	<i>640.000,00</i>
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30.941.113.685	26.709.068.522	86,32	4.232.045.163,00

<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase Realisasi (%)</b>	<b>Sisa Anggaran (Rp)</b>
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30.941.113.685	26.709.068.522	86,32	4.232.045.163,00
Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	322.375.000	316.521.600	98,18	5.853.400,00
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>189.440.000</i>	<i>185.593.200</i>	<i>97,97</i>	<i>3.846.800,00</i>
<i>Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd</i>	<i>7.500.000</i>	<i>7.475.000</i>	<i>99,67</i>	<i>25.000,00</i>
<i>Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd</i>	<i>5.850.000</i>	<i>5.820.000</i>	<i>99,49</i>	<i>30.000,00</i>
<i>Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-Skpd</i>	<i>8.780.000</i>	<i>8.735.000</i>	<i>99,49</i>	<i>45.000,00</i>
<i>Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa-Skpd</i>	<i>11.830.000</i>	<i>11.830.000</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>
<i>Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd</i>	<i>98.975.000</i>	<i>97.068.400</i>	<i>98,07</i>	<i>1.906.600,00</i>
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.460.605.535	23.318.532.016	84,92	4.142.073.519,00
<i>Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn</i>	<i>27.393.605.535</i>	<i>23.259.927.016</i>	<i>84,91</i>	<i>4.133.678.519,00</i>
<i>Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd</i>	<i>12.000.000</i>	<i>11.927.000</i>	<i>99,39</i>	<i>73.000,00</i>
<i>Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Skpd</i>	<i>55.000.000</i>	<i>46.678.000</i>	<i>84,87</i>	<i>8.322.000,00</i>
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	15.000.000	14.980.000	99,87	20.000,00
<i>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Skpd</i>	<i>5.000.000</i>	<i>4.985.000</i>	<i>99,70</i>	<i>15.000,00</i>
<i>Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada Skpd</i>	<i>10.000.000</i>	<i>9.995.000</i>	<i>99,95</i>	<i>5.000,00</i>
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.500.000	55.214.500	99,49	285.500,00
<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>14.600.000</i>	<i>14.362.500</i>	<i>98,37</i>	<i>237.500,00</i>



<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase Realisasi (%)</b>	<b>Sisa Anggaran (Rp)</b>
<i>Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	10.000.000	9.992.000	99,92	8.000,00
<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	30.900.000	30.860.000	99,87	40.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	463.729.050	437.721.650	94,39	26.007.400,00
<i>Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor</i>	115.745.000	109.873.350	94,93	5.871.650,00
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	132.971.600	126.959.000	95,48	6.012.600,00
<i>Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan</i>	20.000.000	20.000.000	100,00	-
<i>Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan</i>	30.003.200	29.022.200	96,73	981.000,00
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd</i>	100.009.250	87.542.100	87,53	12.467.150,00
<i>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd</i>	65.000.000	64.325.000	98,96	675.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	339.527.300	335.521.300	98,82	4.006.000,00
<i>Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya</i>	239.527.300	237.389.300	99,11	2.138.000,00
<i>Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya</i>	100.000.000	98.132.000	98,13	1.868.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.188.680.000	1.169.476.080	98,38	19.203.920,00
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik</i>	132.000.000	113.860.480	86,26	18.139.520,00
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	1.056.680.000	1.055.615.600	99,90	1.064.400,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.095.696.800	1.061.101.376	96,84	34.595.424,00
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan</i>	354.696.800	325.610.376	91,80	29.086.424,00

<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase Realisasi (%)</b>	<b>Sisa Anggaran (Rp)</b>
<i>Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan</i>				
<i>Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya</i>	66.000.000	65.947.000	99,92	53.000,00
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya</i>	170.000.000	168.753.000	99,27	1.247.000,00
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya</i>	505.000.000	500.791.000	99,17	4.209.000,00
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	17.423.300.300	16.898.590.654	96,99	524.709.646,00
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.681.979.000	1.591.840.625	94,64	90.138.375,00
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.616.714.000	1.530.436.275	94,66	86.277.725,00
<i>Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi Dan Spesifik Lokasi</i>	1.459.608.500	1.383.893.475	94,81	75.715.025,00
<i>Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</i>	157.105.500	146.542.800	93,28	10.562.700,00
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (Sdg) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	65.265.000	61.404.350	94,08	3.860.650,00
<i>Pemanfaatan Sdg Hewan/Tanaman</i>	65.265.000	61.404.350	94,08	3.860.650,00
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	14.819.870.750	14.474.302.879	97,67	345.567.871,00
Pengembangan Prasarana Pertanian	150.000.000	128.989.100	85,99	21.010.900,00
<i>Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Lp2b, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Kp2b Dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Lcp2b</i>	150.000.000	128.989.100,00	85,99	21.010.900,00
Pembangunan Prasarana Pertanian	14.669.870.750	14.345.313.779	97,79	324.556.971,00

<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase Realisasi (%)</b>	<b>Sisa Anggaran (Rp)</b>
<i>Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani</i>	9.161.405.000	8.952.950.800	97,72	208.454.200,00
<i>Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Embung Pertanian</i>	720.000.000	720.000.000	100,00	-
<i>Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani</i>	1.936.958.300	1.929.286.800	99,60	7.671.500,00
<i>Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Dam Parit</i>	600.000.000	600.000.000	100,00	-
<i>Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Pintu Air</i>	35.000.000	35.000.000	100,00	-
<i>Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Balai Penyuluh Di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya</i>	2.032.176.700	1.923.745.429	94,66	108.431.271,00
<i>Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya</i>	184.330.750	184.330.750	100,00	-
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	69.950.550	60.764.250	86,87	9.186.300,00
Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	69.950.550	60.764.250	86,87	9.186.300,00
<i>Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (Opt) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan</i>	69.950.550	60.764.250	86,87	9.186.300,00
Program Penyuluhan Pertanian	851.500.000	771.682.900	90,63	79.817.100,00
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	851.500.000	771.682.900	90,63	79.817.100,00
<i>Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani Di Kecamatan Dan Desa</i>	25.000.000	22.591.500	90,37	2.408.500,00
<i>Penyediaan Dan Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Penyuluhan Pertanian</i>	316.500.000	245.176.400	77,46	71.323.600,00
<i>Pembentukan Dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota</i>	510.000.000	503.915.000	98,81	6.085.000,00

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>49.819.401.285</b>	<b>45.037.633.376</b>	<b>90,40</b>	<b>4.781.767.909,00</b>

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2020) realisasi anggaran sebesar 96,29 %, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3. 7**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan**  
**Tahun Sebelumnya (2020)**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Menjamin Ketahanan Pangan Daerah	- Jumlah ketersediaan pangan pokok (beras) - Skor pola pangan harapan (PPH)	1.PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN	496.431.125	484.580.625	97,61	<b>11.850.500</b>
		- Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	185.039.050	184.738.550	99,84	<b>300.500</b>
		- Pengembangan Ketersediaan Dan Penanganan Rawan Pangan	212.109.850	206.109.850	97,17	<b>6000/000</b>
		- Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	40.000.000	35.580.000	88,95	<b>4.420/000</b>
		- Peningkatan dan Pengembangan Pengawasan Keamanan Dan Mutu Pangan	3.092.325	3.092,325	1000	<b>3.089.233</b>
		- Pelatihan Usaha Pengolahan Bahan Pangan Potensi Lokal (DBHCHT)	56.189.900	55.058.900	97,99	1.131.000
Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan daerah	Jumlah produksi komoditas pertanian : 1. Tanaman Pangan 2. Hortikultura 3. Perkebunan	2.PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERAKEBUNAN	4.144.751.043	4.016.407.505	96,9	<b>128.343.538</b>
		- Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Tanaman Serealia	279.228.700	240.337200	86,07	<b>38.891.500</b>
		- Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Palawija	313.368.800	311.732.800	99,48	<b>1.636.000</b>
		- Pengembangan Sistem Penyediaan Benih Padi dan Palawija	64.167.375	64.077.250	99,86	<b>90.125</b>
		- Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	51.460.725	51.460.725	1000	<b>0</b>

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		- Peningkatan Produksi dan Produktivitas Sayuran dan Tanaman Obat	174.587.608	167.717.520	96,06	<b>6.870.088</b>
		- Peningkatan Produksi dan Produktivitas Buah dan Tanaman Hias	236.504.925	229.823.425	97,17	<b>6.681.500</b>
		- Pengembangan Sistem Penyediaan Benih Hortikultura dan Perkebunan	53.239.960	48.620.960	91,31	<b>4.619.000</b>
		- Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura Dari Gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	54.933.300	53.612.550	97,6	<b>1.320.750</b>
		- Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan dan Penyegar	260.099.500	258.369.500	99,33	<b>1.730.000</b>
		- Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim Dan Rempah	2.263.600	2.263.600	1000	<b>0</b>
		- Penguatan Kapasitas Kelembagaan Tani	2.683.800	2.158.800	80,44	<b>525.000</b>
		- Pemberdayaan Buruh Tani	1.676.525.500	1.622.492.925	96,78	<b>54.032.575</b>
		- Penguatan Kerangka Kelembagaan Pertanian Beririgasi Berkelanjutan	186.000.000	183.406.000	98,61	<b>2.594.000</b>
		- Peningkatan Sarana Produksi Pertanian Tanaman Buah-Buahan Dan Tanaman Hias (DBHCHT)	58,091.000	56.188.000	96,72	
		- Penerapan Goodagricultural Practices Budidaya Tembakau Mole Dan Tembakau Hitam (HAKI IG) (DBHCHT)	337.571.250	336.121.250	99,57	<b>1.450.000</b>
		- Pengembangan Data Data Dan Informasi Pembangunan Pertanian	394.025.000	388.025.000	98,48	<b>6.000.000</b>
		<b>3. PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN</b>	<b>10.110.194.341,50</b>	<b>10.027.586.600</b>	<b>99,18</b>	<b>82.607.741,5</b>
		- Pengolahan Air Irigasi Untuk Pertanian	5.090.204.812,50	5.085.318.750	99,9	4.886.063
		- Pembangunan/Perbaikan Sumber Sumber Air	1.815.858.750	1.784.752.250	98,29	31.106.500
		- Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian	868.461.275	866.897.250	99,82	1.564.025
		- Perlindungan Lahan Pertanian	50.000.000	46.750.000	93,5	3.250.000

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		- Pengembangan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna	138.729.000	138.529.000	99,86	200.000
		- Pengelolaan Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	191.771.454	179.590.300	93,67	12.181.154
		- Pengelolaan Penyediaan Dan Pengawasan Pupuk Dan Pestisida	38.019.050	37.929.050	99,76	90.000
		- Pembangunan/Perbaikan Sumber-Sumber Air (DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian)	1.917.190.000	1.887.820.000	98,47	90.000
		4.PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN/PERKEBUNAN	673.108.400	670.898.750	99,67	<b>22.0909.650</b>
		- Penanganan Panen Dan Paca Tembakau Mole dan Tembakau Hitam ( HAKI IG )	1.971.190.000	1.887.820.000	98,47	<b>83.370.000</b>
		- Penanganan Panen,Pasca Panen dan Pengolahan Produk Tanaman Pangan	1.989.750	1.989.750	1000	<b>0</b>
		- Penanganan Panen,Pasca Panen dan Pengolahan Produk Hasil Hortikultura	56.130.600	56.130.600	1000	<b>0</b>
		- Penanganan Panen dan Pengolahan Produk Hasil Perkebunan	186.847.800	184.881.100	98,95	<b>0</b>
		5. PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUHAN PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGNGAN	74.162.300	14.004.300	18,88	<b>60.158.000</b>
		- Peningkatan Kapasitas Penyuluh	74.162.300	14.004.300	18,88	<b>65.880.700</b>
<b>Total</b>			<b>43.318.880.726</b>	<b>41.714.041.272</b>	<b>96,29</b>	<b>231.027.229,5</b>

Dengan demikian, pada tahun 2021 terjadi penurunan realisasi anggaran sebesar 5,89 %.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan Capaian Kinerja**

Secara umum capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2021 rata-rata sebesar 144,49% (Sangat Tinggi/tinggi/rendah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Capaian kinerja Jumlah Produksi Tanaman Pangan Padi sebesar 123,54% (Sangat Tinggi).
2. Capaian kinerja Jumlah Produksi Tanaman Pangan Jagung sebesar 74,54%. (Rendah).
3. Capaian kinerja Jumlah Produksi Tanaman Pangan Lainnya sebesar 184,14%. (Sangat Tinggi).
4. Capaian kinerja Jumlah Produksi Hortikultura sebesar 92,22%. (Tinggi).
5. Capaian kinerja Jumlah Produksi Perkebunan sebesar 116,18%. (Tinggi).
6. Capaian kinerja Jumlah Ketersediaan Pangan Pokok sebesar 146,19%. (Sangat Tinggi).
7. Capaian kinerja Nilai SAKIP dengan kategori BB
8. Capaian kinerja Prosentase tingkat penyerapan anggaran sebesar 92,24%. (Tinggi).
9. Capaian kinerja Inovasi sebesar 400%. (Sangat Tinggi).
10. Capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebesar 120,53%. (Tinggi).
11. Capaian kinerja Indeks Zona Integritas Perangkat Daerah sebesar 81,10%. (Tinggi).

Capaian kinerja tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2020 capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang sebesar 141,49% atau terjadi peningkatan/penurunan kinerja sebesar 17,91%.

### **4.2 Langkah-langkah peningkatan Kinerja**

Ada beberapa langkah dengan pelaksanaan teknis kegiatan dan pelayanan masyarakat :

1. Mengoptimalkan sumberdaya aparatur dan petugas teknis lapangan yang tersedia dengan peningkatan kualitas melalui pembinaan dan mengikutsertakan dalam setiap kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tingkat Kabupaten, Propinsi maupun Nasional.
2. Meningkatkan pembinaan teknis dan manajemen usahatani kepada para petani di Kabupaten Sumedang secara kontinyu.
3. Meningkatkan pemanfaatan potensi lahan pertanian.
4. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia.
5. Meningkatkan upaya pencegahan dini terhadap timbulnya serangan hama penyakit tanaman.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2021, sebagian besar kegiatan telah terlaksana sesuai penetapan kinerja dan indikator kinerja, namun ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target kinerjanya. Oleh

karena itu perlu adanya pembenahan melalui inovasi kinerja dari perencanaan , penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi sehingga harapan dapat dicapai secara lebih maksimal

Sumedang, 2021

Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kabupaten Sumedang



**Ir. KUDI SUPRAYOGI**

Pembina TK.I / IV b

NIP. 19640618 199103 1 007